BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3. 1 Hasil Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

Penyusun melaksanakan aktivitas Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung yang beralamat di jalan Sindang Sirna No 40 Karang Setra Kota Bandung, untuk dapat melaksanakan Kuliah kerja Lapangan (KKL) penyusun melewati beberapa prosedur seperti mengurus surat ijin dari Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung. Surat ijin tersebut menjadi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung bagi para pelajar ataupun Mahasiswa yang akan melakasanakan penlitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) seperti penyusun.

Dinas Sosial Kota Bandung lewat bagian Tata Usahanya, setelah penyusun dapat memenuhi prosedur di atas, menempatkan Penyusun di seksi Tuna Sosial di bawah koordinasi bidang Rehabilitasi Sosial yang merupakan salah satu unit kerja di Dinas Sosial Kota Bandung, seksi Tuna Sosial yaitu bagian kerja yang mengurusi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung yang meliputi Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Sosial (WTS), Wanita Pria (Waria), Korban HIV Aids, Korban Bencana Alam, dan lainnya.

Bagian Tuna Sosial merupakan suatu bagian yang sering melakukan penertiban para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, Bagian Tuna Sosial berisi Lima orang pegawai, empat orang pegawai laki-laki dan satu orang pegawai perempuan. Yang bernama Bapak Tjutju surjana sebagai kasi Tuna Sosial, Bapak Drs. Asep Sugandi sebagai pelaksana seksi Tuna Sosial dan Pelaksana Sub Bag. Keuangan dan Program, Bapak Asep Taryana, Bapak Ade, Ibu Indah sebagai pelaksana seksi Tuna Sosial.

Kuliah Kerja Lapangan yang penyusun laksanakan di seksi Tuna Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, sebetulnya membuat penyusun sedikit

kesulitan dalam menambah wawasan dan data yang penyusun butuhkan dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, karena seksi Tuna Sosial tidak memiliki peran yang cukup dalam penyelesaian anak jalanan di Kota Bandung. untuk mensiasati hal tersebut, penyusun pada beberapa kesempatan selalu mencoba untuk bertanya dan meminta data yang penyusun butuhkan, kepada aparatur yang bertugas di ruanganan Rehabilitasi Sosial, yang kebetulan berhadapan dengan ruangan Tuna Sosial, yang memiliki peran yang besar di Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelesaian permasalaha- permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, penyusun dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tidak dapat di tempatkan di ruangan Rehabilitasi Sosial, oleh bagia Tata Usaha, karena terkendala *quota* yang tersedia.

Penyusun memulai aktvitas Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, dari mulai tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 juli 2012. Dihari pertama penyusun melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), penyusun mendapatkan tugas untuk mendata seorang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seorang gelandangan yang sengaja datang ke Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengajukan permohonan masuk ke Balai Rehabilitasi Bina Karya Cisarua Lembang Kabupaten Bandung Barat, beserta kelurganya, pengajuan permohonan masuk balai rehabilitasi tersebut cukup diwakili oleh satu orang saja, istri atau suami, anak dan Keluarga pemohon ditulis pada kolom pengikut, yang telah tersedia pada formulir permohonan tersebut.

Balai Rehabilitasi Bina Karya Cisarua Lembang Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung untuk penampungan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan dan pengemis, yang pada akhirnya setelah mendapatkan beberapa program dari Balai Rehabilitasi Bina Karya Cisarua Lembang Kabupaten Bandung Barat para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut akan dikembalikan kembali kedaerah asal mereka, berikut ini merupakan contoh formulir permohonan untuk masuk ke balai kehabilitasi sosial tersebut:

Gambar 3.1 Surat Permohonan Masuk Rehabilitasi Sosial
Bina Karya Cisarua Lembang Kabupaten Bandung Barat

SURAT PERNYATAAN MASUK BALAI REHABILITASI SOSIAL

BINA KARYA CISARUA LEMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat Asal :
Tempat Mangkal :
Pengikut :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk masuk Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Lembang dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

P E M O H O N

Sumber: Seksi Tuna Sosial
Dinas Sosial Kota Bandung 2012.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan oleh penyusun di hari kedua, yakni membuat sebuah surat undangan launcing pemulangan kembali para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung ke daerah asal mereka, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. surat tersebut dibuat untuk diajukan kepada instansi terkait di Kota Bandung, acara pemulangan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dipusatkan di Plaza Balai Kota Bandung pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 pukul 08.00.

Penyusun sempat bertanya kepada Bapak Dr. Asep Sugandi yang merupakan seorang pegawai di bagian tuna Sosial, penyusun bertanya, "para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apa saja yang akan dipulangkan kedaerah asalnya, serta mereka yang telah terjaring ataukah mereka yang akan dijaring pada saat penertiban sebelum acara launcing dilaksanakan", dan Bapak Dr. Agus Sugandi menjawab, '"Semua para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Sosial (WTS), dan tentunya Anak Jalanan, dan yang akan dipulangkan yakni mereka yang terjaring penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang bekerja sama dengan Polisi Pamongpraja pada hari kamis malam sampai jum'at pagi hari sebelum acara launcing tersebut berlangsung, penertiban tersebut meliputi seluruh daerah di Kota Bandung". Surat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2 Surat Launcing Pemulangan PMKS
Dinas Sosial Kota Bandung

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS SOSIAL

Jl. Sindang Sirna No. 40 Tlp : (022) 2013139, Fax : (022) 2008044 Bandung

Nomor	:	/ /Dinsos	Bandung, Juli 2012
Sifat	:	-	K e p a da :
Lampiran	:	1 (Satu) Buah	Yth. Daftar Terlampir
Perihal	:	Launcing Penanganan PMKS Jalanan Kota Bandung	di BANDUNG

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Nomor 460/Kep.427-Dinsos/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal tim koordinasi dan kerjasama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Kota Bandung.

Sehubungan hal tersebut akan dilaksanakan peresmian penanganan pola terpadu sekaligus pelepasan PMKS jalanan kembali ke daerah asal, yang akan kami laksanankan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juli 2012
Waktu : 08.00 Wib sampai dengan selesai
Tempat : Plaza Balaikota Bandung

Untuk acara peresmian dimaksud, masing-masing yang terlibat dalam daftar lampiran ini agar mengirimkan peserta apel sebanyak 30 orang dengan atribut lengkap.

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya.

Atas perhatiaannya asaya ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG
SEKRETARIS

Dr. ENJANG MULYANA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 1962 1229 1987 03 1007

Sumber: Seksi Tuna Sosial
Dinas Sosal Kota Bandung

Hari Rabu tanggal 11 Juli tahun 2012 tepatnya jam 10 siang, Bagian Tuna Sosial mengadakan penjemputan kepada seorang gelandangan di daerah Gasibu Bandung, dan penyusun berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penjemputan tersebut, penjemputan tersebut dilaksanakan setelah adanya telepon atau laporan dari seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberitahukan adanya gelandangan yang sedang mengalami gangguan kesehatan, penjemputan dilakukan dengan menggunakan kendaraan Dinas Sosial Kota Bandung, gelandangan tersebut dibawa ke rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung untuk diberikan perawatan. Setelah selesai membawa gelandangan tersebut ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, penyusun dan para bapak-bapak dari Tuna Sosial kembali ke kantor Dinas Sosial Kota Bandung pada pukul 13.00. Penyusun sempat menanyakan bagaimana tindakan selanjutnya kepada gelandangan tersebut, tetapi jawaban yang dilontarkan hanya “hal tersebut telah biasa bahkan gelandangan tersebut sudah tidak asing bagi kami”, pada kesempatan lain penyusun sempat menanyakan hal tersebut kepada pegawai Tuna Sosial lainnya tetapi jawaban yang sama diperoleh oleh penyusun.

Penyusun di hari keempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yakni pada Hari Kamis tanggal 12 Juli tahun 2012 penyusun mendapat tugas membuat jadwal petugas posko pemantau anak jalanan dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, di Lima titik di Kota Bandung, yakni posko Dago, posko Pasteur, posko Pasir Koja, posko Riau dan Posko Asia Afrika, disetiap posko diisi oleh empat belas orang, yang meliputi beberapa instansi terkait yakni, Dinas Sosial Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja, Bina Mitra Polwil Tabes Bandung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, Dinas Perhubungan, dan beberapa instansi lainnya, Satuan Bina Pekerja Sosial (Saktipeksos), Tetapi karena belum adanya koordinasi yang baik dari Dinas Sosial Kota Bandung dengan

Instansi yang terkait tersebut, menyebabkan kurangnya petugas yang ada untuk mengisi posko tersebut, maka dari itu diadakanlah rapat pada ahri tersebut yang diadakan langsung oleh kepala Dinas Sosial kota Bandung Hj. Siti Masnun Samsiati, Sh, sampai denganPenyusun menyelesaikan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), penyusun tidak mengetahui kelanjutan dari pembuatan jadwal petugas posko pemantau tersebut.

Pada hari jum'at tanggal 13 juli tahun 2012 saat pemulangan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Plaza Balai Kota Bandung, di pagi hari itu penyusun hanya melihat acara tersebut dari luar *area* Plaza Balai Kota Bandung, penyusun tidak pergi ke Kantor Dinas Sosial Kota Bandung karena para aparatur Dinas Sosial Kota Bandung semuanya berada di Plaza Balai Kota untuk mengikut acara tersebut.

Penyusun pada Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di minggu kedua tanggal 16 juli tahun 2012, mendapatkan tugas untuk mengerjakan pemindahkan data peromohonan masuk balai rehabilitasi oleh pemohon pada hari senin tanggal sembilan Juli, untuk diisi ke dalam komputer dan dirubah menjadi surat rujukan dari Dinas Sosial Kota Bandung kepada Balai Rehabilitasi Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Surat rujukan tersebut dibuat karena pemohon saudara Asep Sopian, yang telah mengisi permohonan masuk rehabilitasi pada hari sebelumnya, tepatnya tanggal sembilan Juli, telah siap beserta anggota keluarganya untuk diberangkatkan ke balai rehabilitasi Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Berikut contoh surat rujukan dari Dinas Sosial Kota Bandung kepada Balai Rehabilitasi Cisarua Kabupaten Bandung Barat tersebut:

Gambar 3.3 Surat Rukujan Masuk Rehabilitasi Sosial
Bina Karya Cisarua

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS SOSIAL

Jalan Sindang Sirna No. 40 Telepon (022) 2013139 Bandung

Nomor : 461.1 / - Dinsos
Sifat : biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Masuk Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
An. Asep Sopian 1 (satu) KK

Bandung, 13 Juli 2012
Kepada :
Yth.Kepala Balai Rehabilitasi Sosial
Bina Karya Cisarua
Di **BANDUNG BARAT**

Berdasarkan permohonan dari Sdr. Asep Sopian untuk mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Ket
1	Asep Sopian	28 Th	L	Pemulung	Stasiun	
2	Arlin Marlin	22 Th	P	Pemulung	Stasiun	
3	Ahmad saepuloh	1 1/2 Th	L	Pemulung	Stasiun	

Atas permohonan tersebut, kiranya Bapak dapat memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya sebanyak 1 (Satu) KK / 4 Jiwa. Disamping dilakukan Rehabilitasi, kami mohon dapat dikembalikan ke tempat asal.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

Hj. SITI MASNUN SAMSIATI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198603 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
5. Bapak Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Sumber: Seksi Tuna Sosial
Dinas Sosial Kota Bandung 2012.

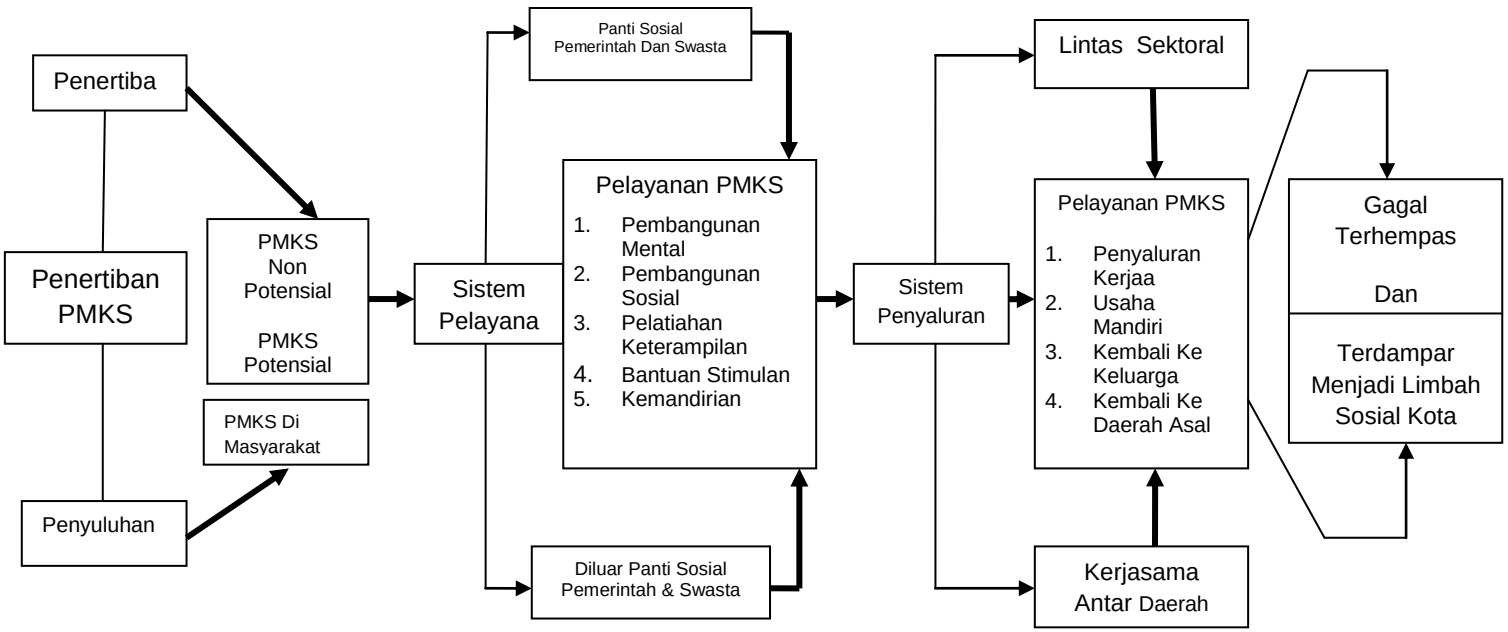
Tanggal 17 Juli 2012 yakni hari ke tujuh penyusun melaksanakan Kuliah kerja Lapangan, Penyusun mendapatkan tugas dari bagian Tata Usaha Dinas Sosial Kota Bandung untuk memperbaharui data para aparat Dinas Sosial Kota Bandung, data tersebut meliputi alamat dan nomor telepon para aparatur Dinas Sosial Kota Bandung. dihari berikutnya tanggal 18 Juli penyusun melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan mendapatkan tugas kembali mendata seorang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) formulir data permohonan masuk balai rehabilitasi tersebut sama halnya dengan data pada tanggal sembilan juli di atas yang telah penyusun berikan contohnya..

Tanggal 19 Juli, dari pagi hingga menjelang siang tidak ada pekerjaan yang penyusun dapat kerjakan di ruangan Tuna Sosial, penyusun mencoba memanfaatkan waktu tersebut untuk mencoba mencari data di ruangan Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) di Dinas Sosial Kota Bandung, untuk menambah wawasan penyusun dan beberapa data yang penyusun perlukan dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung, setelah jam istirahat berakhir penyusun kembali ke ruangan Tuna Sosial, penyusun mencoba merapihkan beberapa data di satu-satunya komputer yang ada Tuna Sosial tentunya dengan meminta izin terlebih dahulu pada Aparatur di Tuna Sosial, yang menjadi alasan penyusun untuk merapihkan data di komputer tersebut yakni karena, data di komputer Tuna Sosial cukup berantakan, banyak *file-file* yang terpisah dari setiap *Foldernya*. sehingga dapat mempersulit pekerjaan para Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung itu sendiri.

Penyusun dihari ke sepuluh melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), penyusun kemabali mengerjakan tugas yang pernah penyusun kerjakan dihari sebelumnya yaitu, membuat surat rujukan masuk rehabilitasi, dari pemohon yang telah mengajukan diri pada hari sebelumnya, hari selanjutnya penyusun Kembali mendapatkan tugas dari bagian Tata Usaha

untuk kembali memperbaiki data pegawai Dinas Sosial Kota Bandung, yang pada hari sebelumnya pernah penyusun kerjakan tetapi mengalami kekeliruan data *input* yang diberikan oleh bagian Tata Usaha tersebut. Hari berikutnya tanggal 24 Juli 2012, penyusun mempelajari dan mencatat bagaimana pola penangan Pola Penanganan Penyandang Masal Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertera pada dinding di ruangan Tuna Sosial, berikut tabel Pola Penanganan Penyandang Masal Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut:

Gambar 3.4 Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dinas Sosial Kota Bandung



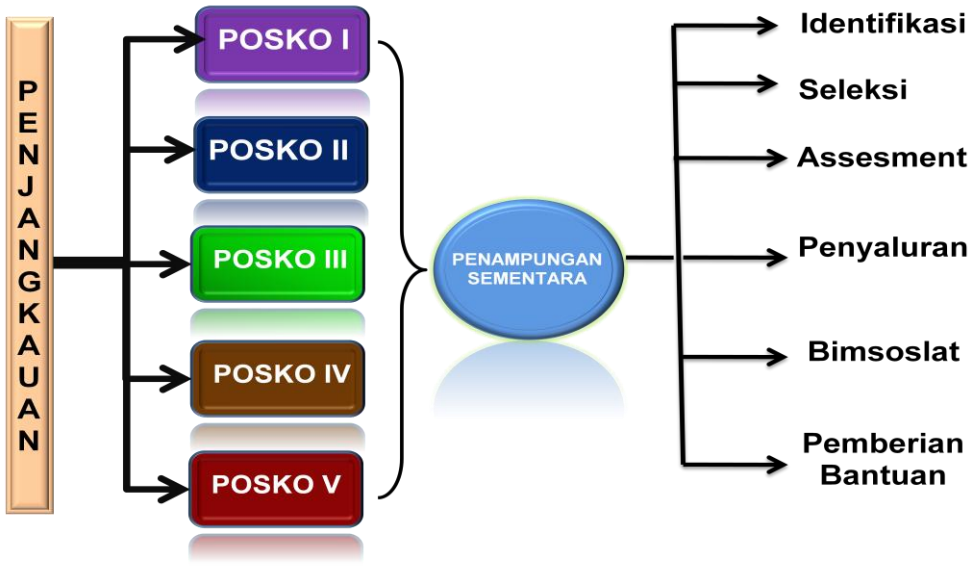
Sumber: Seksi Tuna Sosial
Dinas Sosial Kota Bandung 2012.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Penyusun menyisakan empat hari pada tanggal 25 Juli 2012, dengan begitu pada saat hari itu, penyusun mencoba mengcopy data-data dan merinci data-data yang penyusun perlukan, yang bertujuan untuk mempermudah penyusun dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan sesuai.

Penyusun di hari selanjutnya kembali mendapatkan tugas untuk membuat data pengajuan rehabilitasi yang sebenarnya pernah beberapa kali penyusun kerjakan, pada pembuatan surat pengajuan rehabilitasi kali ini perbedaannya hanya terdapat pada pemohon yang mengajukan permohonan untuk masuk rehabilitasi, pada permohonan-permohonan sebelumnya biasanya hanya terdapat satu pemohon beserta keluarganya, tetapi pada pengajuan kali ini dari satu permohonan masuk balai rehabilitsai terdapat dua keluarga sekaligus dalam satu pengajuannya.

Pada tanggal 27 Juli, penyusun membantu pegawai Tuna Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, membuat tabel yang dibuat di microsoft power point mengenai pejangkauan posko pemantau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, Tabel tersebut menurut pegawai Dinas Sosial Kota Bandung mungin saja dapat dipergunakan dikemudian hari dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial di Kota Bandung, tebel tersebut berisi bagaimana setiap posko menyerkahan setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung ke tempat penampungan sementara untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan lima tahap yakni idntifikasi, seleksi, *assesment* (penaksiran), penyaluran, bimsoslat (bimbingan sosial dan pelatihan), pemberian bantuan, berikut gambar tabel tersebut:

Gambar 3.5 Posko Pemantauan Penyandang Masalh Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung



Sumber: Seksi Tuna Sosial
Dinas Sosial Kota Bandung 2012

Kuliah Kerja Lapangan di hari ke enam belas, penyusun kembali memindahkan data permohonan masuk Balai Rehabilitas Sosial, menjadi surat rujukan dari Dinas Sosial Kota Bandung kepada Balai Rehabilitasi Bina Karya Cisaru Kabupaten Bandung Barat, pemohon tersebut mengisi permohonan masuk Balai Rehabilitasi pada tanggal 2 juni 2012 pada saat penyusun belum melaksanakan Kuliah kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung.

Hari terakhir penyusun melaksanakan Kuliah kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung, penyusun membuat surat keterangan telah melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan sekalian berpamitan dengan para Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung di Seksi Tuna Sosial, Bidang

Rehabilitasi Sosial, dan bagian tata Usaha yang telah memberikan ijin kepada penyusun, untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung selama hampir satu bulan lamanya.

3.2 Pembahasan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Penyusun dalam pembahasan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, akan mengupas kinerja Dinas Sosial Kota Bandung studi tentang pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, yang dikaitkan dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto, dengan beberapa indikatornya yakni secara Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dari Dinas Sosial Kota Bandung, tetapi sebelumnya penyusun akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum mengenai Dinas Sosial Kota Bandung.

3.2.1 Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahtraan sosial, yang mencakup semua upaya program dan kegiataan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina dan memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahtraan sosial dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Disini penyusun akan memaparkan beberapa penjelasan dari visi misi hingga deskripsi kerja Dinas Soslal Kota Bandung.

3.2.1.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung

Visi dari Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Terciptanya Kesetiakawanan Sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga yang layak normatif diliputi suasana kehidupan yang bersih makmur taat dan bersahabat”. Sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kota Bandung adalah:

1. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, bermartabat serta berhati nurani yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka kesejahteraan sosial keluarga dan olah raga serta kesetaraan gender.
2. Mewujudkan pemanfaatan sumber-sumber kesejahteraan yang diarahkan dan didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan daya mampu serta daya jangkau penanggulangan masalah sosial.
3. Mewujudkan upaya kerja sosial sebagai suatu sistem melembaga dalam rangka pembangunan seutuhnya.
4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan upaya/usaha untuk mewujudkan, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Dinas Sosial Kota Bandung dari visinya yang telah penyusun sampaikan di atas yakni “Terciptanya Kesetiakawanan Sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga yang layak normatif diliputi suasana kehidupan yang bersih makmur taat dan bersahabat”, dengan melihat visi tersebut sangat jelas bahwa penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung sangat erat kitannya dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

Empat misi yang dimilik Dinas Sosial Kota Bandung, yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang sesuai dengan pemberdayan bagi para anak jalanan saat ini, menurut penyusun anak jalanan masuk kedalam misi pada point ke empat, yang berupa peningkatan kualitas, mewujudkan,

memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial, lewat pelatihan-pelatiahan pada program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat, maupun lembaga-lembaga swasta yang ada.

3.2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung

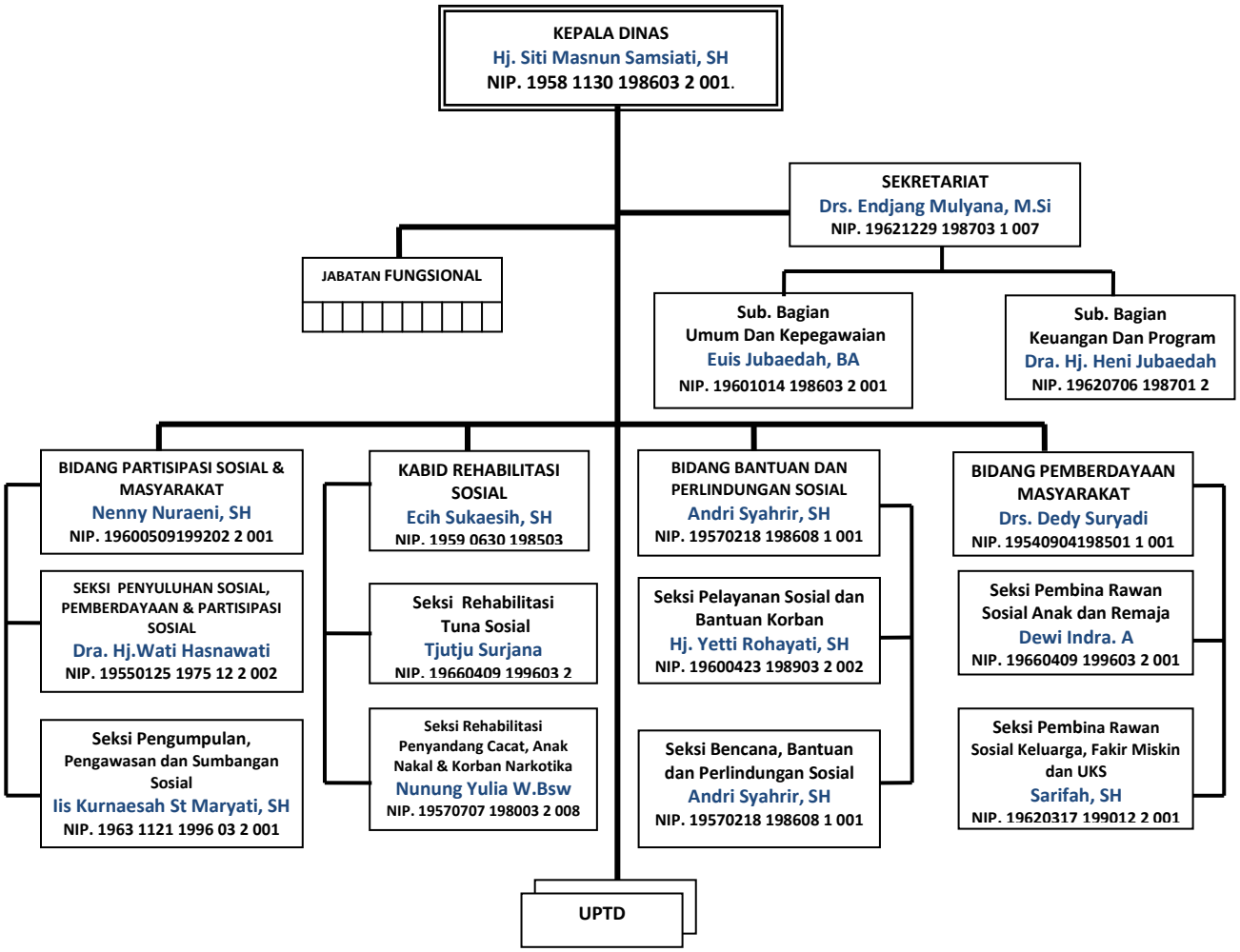
Dinas Sosial Kota Bandung Memiliki tugas pokok dan fungsi, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Bandung yakni, “Melaksanakan sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial”, sedangkan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung adalah:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang sosial.
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang sosial yang meliputi Bina Sosial (Binsos), Pelatiahan Sosial (Pelsos), Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) dan Keluarga Sejahtera.
3. Pelaksanaan Pelayanan teknis ketatausahaan kantor.

3.2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung memiliki bagian-bagian kerja di dalamnya, berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung:

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Seksi Tuna Sosial
Dinas Sosial Kota Bandung 2012.

3.2.1.4 Landasan Hukum Dibentuknya Dinas Sosial

Landasan dibentuknya Dinas Sosial Kota Bandung di lingkungan pemerintahan Kota Bandung didasarkan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang no 22 tahun 1999 pemerintah daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang pedoman organisasi perangkat desa.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2001tentang kewenangan daerah kota sebagai otonomi daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2001 tentang penanganan dan penyelenggaraan kesejahtraan sosial.
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas di lingkungan daerah kota Bandung.

3.2.1.5 Tujuan Kerja Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tujuan kerja dalam mengangani permasalahan sosial di Kota Bandung, berikut tujuan kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung:

1. Meningkatnya pembentukan sikap dan prilaku masyarakat yang menunjang pembangunan Kota.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penaggulangan masalah sosial.
3. Meningkatnya mutu dan jumlah pelayanan sosial kepada masyarakat.
4. Meningkatnya pemberdayaan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada.
5. Meningkatnya potensi-potejnsi masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

6. Meningkatnya suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat yang terbebas dari masalah-masalah kesejahteraan sosial.
7. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

3.2.1.6 Sasaran Kerja Dinas Sosial Kota Bandung

Sasaran Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Dalam menangani permasalahan sosial di Kota Bandung:

1. Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial masyarakat.
2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera .
3. Tersedianya sarana pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.
4. Terwujudnya lembaga-lembaga sosial yang profesional.
5. Tergalinya potensi-potensi masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah kesejahteraan sosial ;
6. Tersedianya tenaga-tenaga sukarelawan bidang sosial yang melaksanakan secara langsung penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

3.2.1.7 Deskripsi Kerja

Deskripsi kerja merupakan penjabaran mengenai pengertian tugas, kewajiban pegawai, wewenang, tanggung jawab, dan jangkauan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja dan dapat terkoordinasi dengan baik. Dinas Sosial memiliki beberapa bagian dan sub bidang dalam pelaksanaan tugas, adapun deskripsi kerja bagian atau sub bidang Dinas Sosial Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung yang dikepalai Ibu Hj. Siti Masnun Samsiati, SH, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung.

2. Sekretariat Dinas Sosial Kota Bandung yang dikepalai oleh Bapak Drs, Endjang Mulyana, M.Si, Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan strategis Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), penyusunan program kerja langsung, tidak langsung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit kerja. yang membawah :
   a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Sub. Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Bandung, dikepalai Ibu Nenny Nuraeni, SH, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat, yang membawahi :
   a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan, dan Partispasi Sosial.
   b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, dikepalai oleh Ibu Ecih Sukaesih, SH, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyusun program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan usaha rehabilitasi sosial. Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kinerja di bidang rehabilitasi sosial.
   b. Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang cacat.
   c. Menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis pelaksanaan Usaha Kesejahtraan Anak, remaja dan lanjut usia dalam/di luar panti, keluarga muda mandiri, wanita rawan social ekonomi dan jaminan sosial.
   d. Menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis pelaksanaan usaha rehabilitasi tuna susila, gelandangan dan pengemis.

e. Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis pelaksanaan usaha peningkatan rehabilitasi eks napi dan korban narkoba.
f. Menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis pelaksanaan usaha pembinaan dan legalitas yayasan, organisasi sosial.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
h. Seksi Rehabilitasi Sosial membawahi:
    1. Seksi Tuna Sosial.
    2. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal, dan Korban Narkotika.

5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung yang dikepalai oleh Bapak Andri Syahrir, SH, mempunyai fungsi memberikan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang membawahi:
    a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana.
    b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
6. Bidang Pemberdayaan Masyrakat di dinas Sosial Kota Bandung yang di kepalai oleh Drs. Dedy Suryadi, memeiliki fungsi dalam program - program pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan didalamnya di Kota Bandung, yang membawahi:
    a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja.
    b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, dan UKS.

Penyusun dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di tempatkan pada Seksi Tuna Sosial yang dikepalai oleh Bapak Tjutju Surjana, Seksi Tuna Sosial merupakan salah satu bagian yang berada di bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung.

3.2.2 Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) telah memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun mengenai bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalah anak jalanan (anjal) di Kota Bandung. Penyusun dalam melaksanaan Kuliah Kerja Lapangan banyak mengamati kinerja pegawai Di Dinas Sosial Kota Bandung, dalam keseharian kerjanya di Dinas Sosial Kota Bandung, menurut Agus Dwiyanto, ada beberapa indikator dalam kinerja organisasi yaitu “Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas”. Berikut coba penyusun uraikan indikator - indikator tersebut sesuai dengan Kuliah Kerja Lapangan yang penyusun laksanakan di Dinas Sosial Kota Bandung:

3.2.2.1 Produktivitas Dinas Sosial Kota Bandung Mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung

Produktivitas kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, mencakup Karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, yang bermuara pada produktivitas Dinas Sosial Kota Bandung itu sendiri. Produktivitas dapat pula menjadi alat ukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil yang telah ditetapkan yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi saja, tetapi juga efektivitas pelayanan, Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output.*

Produktivitas kinerja Dinas Sosial Kota Bandung bila dilihat dan dirasakan oleh penyusun saat penyusun melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung, Produktivitas dari para aparaturnya masih jauh dari harapan, salah satu contohnya dapat dilihat dari

masih sedikitnya para Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung yang dapat memanfaatkan peran teknologi saat ini seperti mengoprasikan perangkat komputer yang telah tersedia, disetiap bagian yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung, hanya satu atau dua orang saja para aparatur yang dapat mengoprasikan perangkat komputer, hal tesebut tentunya menjadi hambatan yang akan mempengaruhi produktivitas Dinas Sosial Kota Bandung itu sendiri. Dengan begitu maka secara otomatis akan berakibat pada rendahnya produk-produk yang dihasilkan Dinas Sosial Kota Bandung untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Bandung khusunya dalam program pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung,

Pencapaian hasil yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dapat dilihat langsung di lapangan masih jauh dari harapan, terbukti dari masih banyaknya dan bahkan tiap hari makin banyak jumlah dari anak jalanan yang ada di Kota Bandung. seperti yang penyusun lihat di perempatan Tol Pasteur di Jalan Dr. Djundjunan Kota Bandung, yang seakan tidak pernah lepas dari kehidupan anak jalanan baik disiang maupun dimalam hari.

Arti produktivitas sebenarnya dapat mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia (individu atau kelompok) untuk selalu meningkatkan mutu kehidupannya dan penghidupannya. Produktivitas sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga prosesnya berlangsung tepat waktu dan dengan demikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama implikasi biayanya, dan kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan produktivitas dijadikan salah satu sasaran jangka panjang institusi dalam langka pelaksanaan strateginya kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Aparatur yang mempuanyai kreativitas yang tinggi maka akan menghasilkan mutu yang menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh semua satuan kerja dalam institusi atau organisasi pemerintahan tersebut, baik pelaksana tugas pokok maupun pelaksana tugas penunjang, peningkatan mutu tersebut tidak hanya penting secara internal, akan tetapi juga secara eksternal karena akan tercermin dalam interaksi organisasi dengan lingkungannya yang pada gilirannya turut membentuk citra organisasi dimata berbagai pihak seperti pemerintah maupun masyarakat begitu pula dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

Pemanfaatan waktu kerjanya Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, penyusun rasakan masih belum maksimal, karena masih ada beberapa aparatur yang datang terlambat, atau keluar kantor pada jam kerja tanpa dilandasi alasan yang jelas atau kepentingan dinas, seperti tertinggalnya alat pribadi maupun sebagainya, hal tersebut tentunya jelas sangat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Bandung. lebih lanjut Dinas Sosial Kota Bandung, penyusun rasa masih kekurangan aparatur yang memiliki kompetensi dan kreatifitas yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial, hal ini tentu mengakibatkan minimnya *input* dari Dinas Sosial Kota Bandung, pada program-program yang jitu dan tepat sasaran, dalam penanganan pemberdayaan bagi para anak jalanan pada khususnya, dan para Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) pada umumnya di Kota Bandung, yang sejatinya telah tertuang pada salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni, Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang sosial yang meliputi Bina Sosial (Binsos), Pelatiahan Sosial (Pelsos), Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) dan Keluarga Sejahtera.

Meningkatkan sumber daya para aparatur secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu institusi atau organisasi pemerintahan sangat perlu dilakukan, yang pada akhirnya memiliki tujuan agar institusi

atau organisasi pemerintahan tersebut (Dinas Sosial Kota Bandung) dapat mengeluarkan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Bandung, dengan begitu maka akan tercapai tujuan dan sasaran kerja yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dengan meningkatnya sumber daya manusia di tubuh Dinas Sosial Kota Bandung maka akan menghasilkan pada tingginya nilai pencapaian Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, yang ada di Kota Bandung.

Pemberdayaan bagi para anak jalanan dalam penanganannya membutuhkan suatu terobosan-terobosan yang dapat memberikan rangsangan kepada para anak jalanan untuk dapat menerima apa yang diberikan dalam proses pemberdayaan tersebut, meskipun saat ini Dinas Sosial Kota Bandung tidak berperan langsung dalam proses pemberdayaan, dikarenakan Dinas Sosial Kota Bandung tidak memiliki tempat penampungan khusus bagi para anak jalanan di Kota Bandung. Para anak jalanan yang berdomisili di Kota Bandung yang telah terjaring pada saat dilakukannya rajia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) walaupun pada hakikatnya rajia kepada anak jalanan tidak diperbolehkan dilakukan secara paksa karena dapat merusak hak-hak anak, pada saat ini dititipkan pada Dinas Sosial Provinsi jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rumah Perlindungan Anak (RPA), yang ada di Kota Bandung, tetapi hal tersebut bukan menjadi suatu alasan bagi Dinas Sosial Kota Bandung untuk tidak memberikan terobosan-terobasan yang menjadi input dalam proses pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung. Terobosan dalam pemberdayaan anak jalanan tentunya dapat di komunikasikan dengan dinas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang telah memiliki kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung tersebut.

Suatu organisasi pemerintahan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya meningkatkan produktivitas kerja sebagai sistem organisasi tersebut, termasuk sistem manajemen, sistem fungsional dan sistem operasional. bukan merupakan hal yang baru apabila dikatakan bahwa yang dimaksud sengan produktivitas ialah terdapatnya korelasi “terbalik” antara masukan dan keluaran. Artinya, suatu sistem dapat dikatakan produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar, dalam penyelesaian masalah-masalah anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung sepertinya gairah dalam melakukan masukan-masukan yang dapat membantu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh beberapa instansi maupun lembaga terkait dilihat dari hal tersebut sangat jelas minimnya produktivitas Dinas Sosial berkaitan dengan penyelesaian anak jalanan, karena produktivitas memiliki dua dimensi, pertama efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan berkualitas, kuantitas, dan waktu. Kedua yaitu efesiensi yang berkaitan dengan upaya membandingakan input dengan realisasi penggunaanya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

3.2.2.2 Kualitas Layanan Dinas Sosial Kota Bandung Mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung

Kualitas layanan mencakup Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanaan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Kualitas pelayanan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan. Kualitas pelayanan juga diartikan

sebagai suatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan masyarakat Kota Bandung, atas prestasi Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanganan para anak jalanan.

Baik atau buruknya kualitas layanan suatu organisasi disini (Dinas Sosial Kota Bandung) tentunya akan menentukan pandangan atas kepuasan yang akan dikeluarkan atau disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung atas pencapain kerja Dinas Sosial Kota Bandung. Karena Dinas Sosial Kota Bandung bekerja atau mengurusi masalah-masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, maka masyarakat akan dengan mudah (hanya dengan melihat langsung lingkungan di sekitar mereka) untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Kualitas layanan dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam mengentaskan permasalahan sosial di Kota Bandung yang mencakup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan didalamnya masih sangat minim, Penyusun melihat saat penyusun melaksanankan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial kota Bandung, ada bentuk ketidakpuasan dari media cetak lokal di Kota Bandung yang memuat berita, bahwa data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung mengenai Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Bandung sudah basi atau tidak lagi sesuai dengan apa yang ada di lapangan, karena hingga penyusun menulis laporan ini, data yang dinyatakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung mengenai jumlah anak jalanan masih menggunakan data pada tahun 2009. Data anak jalanan menurut Dinas Sosil Kota Bandung saat ini mencapai 4.821 anak jalanan di Kota Bandung, berikut ini data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung. hingga saat ini:

Tabel 3.1 Data Penyandang Masalah kesejahteran Sosial di Kota Bandung

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun 2009
1	Balita terlantar	Orang	360
2	Anak terlantar	Orang	6643
3	Anak korbn tindak kekerasan	Orang	42
4	**Anak jalanan**	**Orang**	**4821**
5	Anak nakal	Orang	239
6	Anak cacat	Orang	484
7	Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)	Orang	7537
8	Wanita korban tindak kekerasan	Orang	86
9	Lanjut usia terlantar	Orang	2575
10	Lanjut usia korban tindak kekerasan	Orang	49
11	Penyandang cacat	Orang	3999
12	Penyandang cacat eks penyakit kronis	Orang	1806
13	Tuna susila	Orang	511
14	Pengemis	Orang	4126
15	Gelandangan	Orang	948
16	Eks narapidana	Orang	282
17	Korban penyalahgunaan napza	Orang	363
18	Keluarga fakir miskin	KK	84287
19	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	6395
20	Keluarga bermasalah sosial psikologis	KK	2967
21	Komunitas adat terpencil	Orang	-
22	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan	Orang	4149
23	bencanaKorban bencana alam	KK	551
24	Korban bencana sosial	KK	-
25	Pekerja migran	Orang	13
26	Korban HIV Aids	Orang	1268
Jumlah			134,857

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kota Bandung 2012

Dinas Sosial Kota Bandung, menurut salah satu aparaturnya menyatakan data tersebut diatas, masih belum seragam, hal ini disebabkan karena anak jalanan sebagai suatu permasalahan perkotaan kedatangannya sangat sulit untuk diprediksi melalui angka mutlak, persoalan pendataan jumlah anak jalanan disebabkan oleh latar belakang dan proses munculnya anak jalanan tersebut, dengan demikian, Dinas Sosial Kota Bandung menetapkan jumlah anak jalanan binaan di tiap Lembaga Swadaya Msyarakat (LSM) atau pun Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang berada di Kota Bandung, saat ini di Kota Bandung ada sekitar sepuluh Rumah perlindungan Anak (RPA) yang membantu Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung untuk menangani permasalahan anak jalanan.Ketiadakpuasan lain mengenai kualitas layanan dalam masalah pemberdayan anak jalanan dari Dinas Sosial Kota Bandung dapat dengan mudah kita jumpai dan kita temui di beberapa web-web dari media internet, seperti mengenai metode program penanganan anak jalanan yang tidak tepat sasaran sehingga anak jalanan selalu kembali ke jalanan.

Kualitas layanan Dinas Sosial Kota Bandung dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung diharuskan memenuhi kebutuhan para anak jalanan dan tentunya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, disini penyusun artikan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan cara pemberian pelatihan-pelatihan sesuai dengan bakat dan minat para anak jalanan pada program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh intstitusi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung. beberapa ini merupakan program-program pemberdayaan yang umumnya diberikan bagi para anak jalanan yang mendekati usia kerja, yakni:

1. Menjahit
2. Otomotif

3. Memasak
4. Bermain Musik
5. Service Handphone
6. Perbengkelan

Penyelesaian anak jalanan di Kota Bandung tentu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Bandung saja, mengingat Dinas Sosial Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kekebijakan-kebijakannya, khususnya untuk kebijakan permasalahan anak jalanan, menurut Ibu Dewi Indra, SH yang menjabat sebagai kepala seksi pembinaan rawan sosial anak dan remaja di Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung saat ini dibantu oleh pihak-pihak yang memeiliki tujuan yang sama dalam melindungi dan menangani tujuan sama dalam melindungi dan menangani anak jalanan di Kota Bandung sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 72 menjelaskan bahwa:

a. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak
b. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh perseorangan , lembaga perlindungan anak, sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, badan usaha dan media masa.

Hadirnya lembaga-lembaga sosial masyarakat yang memiliki tujuan yang sama tentunya sangat membantu kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung, dan kehadiran lembaga-lembaga sosial tersebut tentunya telah sesuai dengan dasar hukum yang kuat, sebagaimana telah penyusun sampaikan sebelumnya, dengan demikian telah menunjukan keberpihakan

masyarakat terhadap anak jalanan, penanganan terhadap anak jalanan mempunyai dua tujuan:

a. Melepaskan anak jalanan untuk dikembalikan pada keluarga asli, pengganti atau panti.
b. Penguatan anak jlanan dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.

Pemberdayaan anak jalanan, masih dari penyampaian ibu Dewi Indra, SH, ada salah satu program pemberdayaan yang kerap dilkukan secara rutin, satu tahun sekali yang dilaksanankan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan meminta anak jalanan kepada Dinas Sosial Kota Bandung untuk program pelatihan yang mereka adakan, jumlah anak jalanan dari program pelatihan tersebut rata-rata berjumlah sepuluh anak di setiap tahunnya. Pembinaan di Panti Sosial Bina Karya “Budi Dharma” palimanan Kabupaten Cirebon yang berkapasitas 40 orang, dan Balali Pemulihan Sosial Ciganjeng Ciamis yang berkapasitas 80 orang, kedua tempat tersebut dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Pengembalian anak jalanan yang bukan warga Kota Bandung, biasanya akan dikembalikan kedaerah asal mereka, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menyerahkan anak jalanan kepada Dinas Sosial Kota Bandung, untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk dipulangkan, pemulangan anak jalanan tidak dilakukan oleh oleh Dinas Sosial Kota Bandung, karena Dinas Sosial Kota Bandung terganjal masalah anggaran yang tersedia.

Anak jalanan yang bermukim di Kota Bandung bila terjaring rajia oleh Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) maka biasanya akan dititpkan sementara kepada Dinas Sosial Kota Bandung untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang ada di Kota Bandung

untuk diberikan pelatihan-peltihan di Kota Bandung terdapat sekitar 50 LSM yang memberikan pelayanan bagi anak jalanan dan sebagian besar diantaranya memiliki rumah singgah, salah satu contohnya Rumah Perlindungan Anak yang ada di Kota Bandung adalah Rumah Pelindungan Anak Bahtera yang berada di bawah yayasan Bahtera dan berdiri di Kota Bandung pada tanggal 27 Oktober 1995, yang memberikan pelayanan:

a. Pengembalian ke sekolah formal atau yang disebut Kelas Layangan Khusus (KLK) bekerjasama dengan enam sekolah dasar di Kota Bandung, yakni SD Cibaduyut, SD Kholis, SD Pasir Kaliki, SD Lugnasari, SD Genta Maksindas, sebelum anak di kembalikan ke pada pendidikan formal, sebelumnya anak akan dibina terlebih dahulu.
b. Pemberian Jamkesos (Jaminan Kesehatan Sosial yang bekerjasama denga Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung.
c. Penyaluran anak ke pesentren, itupun bila mana anak tersebut bersedia.
d. Melakukan Kunjungan ke rumah atau keluarga anak jalanan yang dilakukan satubulan sekali

3.2.2.3 Responsivitas Dinas Sosial Kota Bandung Mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung

Responsivitas mencakup Kemampuan organisasi. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya. Responsivitas organisasi akan sangat memperlihatkan atau menunjukan kinerja organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya. Dinas Sosial Kota Bandung berkewajiban mengenali bagaimana karakteristik para anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kota Bandung yang bertujuan untuk memudahkan kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam memberikan respon yang baik

untuk menyelesaikan masalah-masalah anak jalanan dan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang kian hari kian memperihatinkan dan bertambah jumlahnya.

Penyusun saat melaksanakan kuliah Kerja Lapangan (KKL) melihat responsivitas yang baik dari Dinas Sosial Kota Bandung, seperti saat adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengenai adanya seorang gelandangan yang sedang mengalami gangguan kesehatan, dengan segera Dinas Sosial Kota Bandung, lewat bagian Tuna Sosial segera melakukan penjemputan, hanya saja yang penyusun sayangnya tidak ada tindak lanjut kepada gelandangan tersebut setelah gelandangan tersebut diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, gelandangan termasuk kedalam Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

Empat poin misi Dinas Sosial Kota Bandung, didalamnya terdapat satu poin yang penyusun garis bawahi yakni: “Meningkatkan kualitas dan jangkauan upaya ata usaha untuk mewujudkan, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat”. dari misi tersebut jelas mencerminkan tugas Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani permasalahan sosial di Kota Bandung.

Kesejahteraan sosial merupakan kehendak seluruh masyarakat dan berkaitan dengan responsivitas yang menggambarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, begitu pula dengan anak jalanan dan keluaganya, Responsivitas Dinas Soisial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan anak jalanan sesuai dengan tugas yang di emban oleh Dinas Sosial Kota Bandung saat ini yakni menyelesaikan kesejahteraan sosial, maka dari itu Dinas Sosial kota Bandung telah membangun lima posko di lima titik di Kota Bandung walau hingga saat ini posko tersebut belum

mampu di maksimalkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, lima titik posko tersebut yakni:

a. Posko Pasteur yang meliputi: Cipaganti, Cihampelas, Cikapayang, Taman Sari, Gasibu.
b. Posko Dago yang meliputi: Simpang Dago; Sulanjana, Lembong, Aceh.
c. Posko Asia Afrika yang meliputi: Otista, Simpang Lima, Dalem Kaum, Sudirman.
d. Posko Riau yang meliputi: Gatot Subroto, Martanegara, Jalan Jakarta, Antapani, Cicaheum dan Tegal Lega.
e. Posko Pasir Koja yang meliputi: Jamika, Caringin, Cibaduyut, Kopo, Moh Toha, buah Batu, Samsat

Posko pengawasan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang digadang-gadang dapat membantu dalam proses pemantauan anak jalanan, sampai saat ini belum dapat dimaksimalkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan bahkan belum di isi oleh para petugas posko, padahal bila mana posko pengawasan tersebut dapat dimaksimalkan akan sangat membantu karena posko tersebut secara langsung mengawasi pergerakan para anak jalanan secara langsung sebelum para anak jalanan tersebut masuk dalam proses pemberdayaan.

Responsivitas Dinas Sosial Kota Bandung, dalam pemberdayaan anak jalanan, menurut penyusun masih kurang maksimal, karena saat proses pemberdayaan berjalan di beberapa institusi lemabaga terakit, Dinas Sosial Kota Bandung terkesan lepas tangan pada proses pemberdayaan tersebut. Padahal untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dalam suatu proses pemberdayaan diperluakan pemantauan mengenai perkembangan si anak dalam proses pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan oleh institusi, lembaga, maupun Rumah Perlindungan Anak (RPA), dengan demikian maka Dinas Sosial Kota Bandung dapat mengetahui kapan para

anak jalanan tersebut dapat di kembalikan kembali kepada keluarganya, serta yang paling penting agar Dinas Sosial Kota Bandung dapat mengetahui berbagai macam karakter si anak untuk kepentingan dalam penyelesain anak jalanan dalam masa yang akan datang.

Pemberdayaan bagi para anak jalanan yang bermukim di Kota Bandung khususnya harus dilakukan beriringan dengan proses pendampingan sosial, pendampingan sosial yakni suatu proses pemberdayaan yang dilakukan kepada keluarga para anak jalanan atau dapat disebut juga sebagai program pendampingan sosial, bagi keluarga para anak jalanan yang berupa pelatihan-peatihan, pemberian pinjaman usaha tetapi bukan dilakukan denagan cuma-cuma, maupun pemberian alat-alat seperti mesin jahit, kompor dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk melakukan sutu usaha, dalam pemberian pinjaman usaha secara cuma-cuma hanya dalam keadaan genting saja, dan pemberian pinjaman uasah diperlukan pengawasan yang intensif. Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin,

Pendampingan sosial tersebut penyusun masukan kepada responsivitas karena seperti yang telah penyusun sampaikan sebelumnya, bahwa Responsivitas mencakup Kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan proses pendampingan sosial maka akan menjadi suatu pelangkap dalam proses pemberdayan bagi para anak jalanan, anak jalanan yang telah selesai dalam proses pemberdayaan akan kembali kerumah dengan suasana yang baru, karena orang tua maupun keuarga mereka telah mendapatkan pelatihan yang bermuara dalam memperbaiki ekonomi mereka.

Pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, belum dapat dilakukan secara maksimal, berkitan dengan hal sebelumnya karena terganjal oleh proses pendataan para anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandung yang belum berjalan baik, Dinas

Sosial Kota Bandung hingga saat ini belum memiliki data satu per satu nama serta alamat para anak jalanan yang berkeliaran dijalanan kota Bandung, menurut aparatur Dinas Sosial Kota Bandung pendataan tersebut sedang dilakukan.

Data terbaru anak jalanan saat ini mutlak dibutuhkan agar proses pendampingan sosial dapat berjalan tepat sasaran, dengan begitu Dinas Sosial Kota Bandung dapat dengan mudah untuk memberikan pelatihan kepada para orang tua dan si anak secara satu paket, yang akan menghasilkan terselesaikannya dua pekerjaan secara sekaligus yaitu terselesaikannya maslah anak jalanan dan yang kedua, terselesaikannya masalah keluarga tidak mampu.

3.2.2.3 Responsibilitas Dinas Sosial Kota Bandung Mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas merupakan salah satu faktor penting dari manajemen yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila responsibilitas tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Responsibilitas dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan.

Responsibilitas harus mampu berjalan dengan baik, oleh karena itu seorang pemimpin yaitu kepala dinas harus benar-benar mengetahui, menguasai, mendalami semua tanggungjawab para aparatur, dengan demikian selanjutnya kepala dinas dapat menerapkannya dan melaksanakannya dengan tepat kepada setiap individu para aparatur, maupun disetiap bagian kerjanya, sedangkan pelaksanaan itu sendiri harus benar-benar menguasai setiap rangkaian (bagian-bagian) dari pada gerak

ke arah tujuan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, maka diharapkan dapat menimbulkan semangat kerja tanpa harus diperintah.

Responsibilitas dari Dinas Sosial Kota Bandung menurut penyusun sudah cukup baik, karena penyusun melihat segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Berdasarkan keterangan salah satu aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung secara aktif selalu melakukan kordinasi-kordinasi dengan para para awaknya disetiap bagain kerja wilayahnya di Dinas Sosial Kota Bandung, bila mana terjadi suatu kekeliruan-kekeliruan pada program yang akan berjalan maupun program-program yang sudah berjalan.

Penyusun saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung, melihat disetiap ruanganan di Dinas Sosial Kota Bandung ada suatu pemberitahuan mengenai jadwal masuk kerja dan pulang kerja bagi para Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, yang menurut penyusun sangat baik untuk mejaga kedisplinan para pegawai, agar selalu sesuai dan patuh dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

Pelatihan sikap disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap norma dan aturan yang berlaku baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh karena itu disiplin kerja aparatur sangat mempengaruhi terhadap kinerja dalam suatu lembaga atau organisasi secara keseluruhan, apabila aparatur dalam organisasi tersebut memiliki tingkat kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka hasilnya akan baik dan bisa dikatakan suatu prestasi kerja yang memuaskan, sedangkan sebaliknya bila aparatur dalam organisasi tersebut tidak memiliki tingkat disiplin yang tinggi atau baik

dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka hasil yang diperoleh akan sangat jauh dari yang diharapkan.

Responsibilitas menunjuk kepada keselarasan antara Aparatur dalam kegiatan dengan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuannya dan merupakan salah satu prinsip dimana para Aparatur wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola suatu pelayanan kepada para pengguna layanan, pegguna layanan disini adalan masyarakat, Dinas Sosial Kota Bandung harus dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat khususnya dalam permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, agar masyarakat tidak terganggu dan merasa risih dengan adanya anak jalanan yang berkeliaran di jalanan Kota Bandung. sebagai wujud kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Bandung.

Prinsip tanggung jawab ada sebagai kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh masyarakat kepada para aparatur yang menjadikan suatu peranan dalam meningkatkan kinerja organisasi, Begitu pula Pelatihan sikap disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap norma dan aturan yang berlaku baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu disiplin kerja aparatur sangat mempengaruhi terhadap kinerja dalam suatu lembaga atau organisasi secara keseluruhan.

Responsibilitas Dinas sosial Kota Bandung dalam pemberdayaan bagi para anak jalanan telah dilakukan sesuai dengan administrasi dan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya, kebijakan maupun administrasi tersebut yakni dengan adanya kesepakatan dari Dinas Sosial Kota Bandung dengan para institusi maupun lembaga yang menjadi perangkul anak di jalanan, maupun, penampung para anak jalanan, baik itu institusi seperti Dinas Sosial Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun

Rumah Perlindungan Anak (RPA) di dalam maupun di luar Kota Bandung untuk penitipan anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam pengiriman anak jalanan yang telah terjaring sebelumnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada institusi maupun lembaga-lembaga yang terkait, yang telah penyusun sampaikan sebelumnya, selalu melengkapi surat pengantar kepada institusi maupun lembaga-lembaga terkait tersebut, begitu pula saat Dinas Sosial Kota Bandung akan melakukan rajia kepada para beberapa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung, surat pengantar bagi pihak-pihak terkait dengan acara tesebut selalu beriringan dibuat oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dengan begitu telah menandakan adanya prinsip-prinsip administrasi yang baik dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam penjaringan atau rajia kepada anak jalanan, harusnya lebih dikoordinasikan kembali oleh Dinas Sosial Kota Bandung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena anak memiliki hak-haknya yang tentunya harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah dan semua aspek masyarakat, agar pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung dapat sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai denagn apa yang telah ditentukan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa sesuai amanat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dinas Sosial Kota Bandung menurut salah satu aparatur hanya bisa menjaring gelandangan dan pengemis (gepeng) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, namun, yang menjadi masalah seringkali gelandangan dan pengemis tersebut memiliki anak, orang tua dan anaknya tentu saja sulit dipisahkan, denagan begitu banyak anak jalanan

ikut tertangkap bersama orang tuanya yang tergolong seorang gelandangan dan pengemis. Penjaringan atau rajia terhadap anak jalanan ataupun anak telantar seharusnya dilakukan dengan melibatkan para pekerja sosial yang profesional, sebab mereka lebih memahami seluk beluk pemasalahan anak jalanan dan akar permasalahannya,

3.2.2.3 Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bandung Mengenai Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Bandung

Akuntabilitas publik menunjuk pada berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak yang diinginkan oleh masyarakat banyak.

Kinerja organisasi tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, suatu kegiatan organisasi akan memiliki akuntabilitas yang tinggi bila mana kegiatan atau program-program tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugasnya, begitu pula dengan Dinas Sosial Kota Bandung yang secara tidak langsung mendapatkan mandat oleh seluruh masyarakat Kota Bandung untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan kesejahteraan sosial di kota Bandung khususnya permasalahan anak jalanan yang kian hari kian mengkawatirkan di Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, secara tidak langsung terikat dengan masyarakat, untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini

diperluakan adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah, oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah, untuk dapat mempertanggung jawabkan mandat atau kewenangannya kepada masyarakat maupun publik melalui lembaga perwakilannya, Instansi pemerintah harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan serta menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, untuk diketahui oleh masyarakt luas, sementara sumber daya yang menjadi penunjangnya, dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya, wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Sarana Prasarana yang menjadi penunjang bagi Dinas Sosial Kota Bandung, yang di sediakan oleh pemerintah saat ini terbilang sangat minim, dengan begitu Dinas Sosial Kota Bandung, dalam pertanggung jawabannya dalam mengelola sumberdaya dan prasarananpun berbanding lurus dengan apa yang telah diamantakan kepada mereka, hal tersebut secara prasarana dapat dilihat dari mulai kurangnya alat transportasi untuk menjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kurangnya biaya dalam program pemulangan anak jalanan ke daerah asal, hingga tidak adanya tempat penampungan bagi para anak jalanan untuk pelaksanaan program

pemberdayaan, dan sangat ironis Kota Bandung yang merupakan kota dengan tingkat kedatangan anak jalanan yang cukup tinggi, tidak memiliki tempat penampungan bagi para anak jalanan, walaupun saat ini telah Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan pembangunan pusat kesejahteraan sosial di daerah Rancacili Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan akuntabilitasnya, baik dari segi internal maupun eksternal, dari hasil pengamatan penyusun selama melaksanankan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kota Bandung akuntanbilitasnya dari segi internal sudah cukup baik, hanya saja, Dinas Sosial Kota Bandung tidak mampu menjaga konsistensi dan mengembangkan program-program kerja yang telah mereka buat. Sementara itu akuntabilitas Dinas Sosial dalam segi eksternal terlampau sulit bila Dinas Sosial Kota Bandung tidak menunjukan perannya dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan serta pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam memperkecil masalah-masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Bandung.

Sedekah yang diberikan oleh masyarakat kepada anak jalanan sebagai salah satu contohnya, telah menjadi hal yang biasa dan lumrah bagi masyarakat pada umumnya, Dinas Sosial Kota Bandung saat ini penyusun lihat kurang dalam memberikan sosialisasi terbaik kepada masarakat untuk menyumbangkan uangnya ketempat-tempat seharusnya, seperti rumah perlindungan anak atau panti asuhan, dengan demikian masih banyaknya masyarakat yang secara cuma-cuma memberikan sedekahnya kepada para anak jalanan, dengan demikian secara tidak langsung telah menggambarkan ketidaktahuan maupun ketidak yakinan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh Dinas Soisal Kota Bandung kepada anak jalanan dan lebih memilih untuk membantu para anak jalanan secara langsung, padahal hal tersebut sangatlah tidak membantu bagi para anak jalanan tersebut.

Dinas Sosial Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung saat ini melakukan sosialisainya hanya dengan memasang papan iklan saja, tanpa memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau setidaknya melakukan sosialisai lewat media cetak maupun media elektronik, karena tidak semua masyarakat mengetahui apa tujuan dari papan iklan tersebut, atau tidak semua masyarakat melihat bahkan sempat membaca isi yang disampaikan dari papan iklan tersebut.

Bersedekah secara langsung kepada anak jalanan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kebiasaan buruk dan ironsinya merupakan sebuah tindakan dapat dicegah atau dapat diberikan hukuman, karena hal tersebut sangatlah lumrah dalam kehidup masyarakat, disinilah peran dari pemerintah, masyarakat atau orang-orang yang memiliki intelektual tinggi dan tentunya Dinas Sosial kota Bandung itu sendiri dalam membenahi hal tersebut, yang diharapkan mampu untuk memberikan sosialisasi yang sempat penyusun sampaikan sebelumnya, karena bagaimanapun memberikan uang secara langsung kepada anak jalanan bukan merupakan tindakan yang dapat membantu memperbaiki kehidupan para anak jalanan, dengan dibiarkannya masyarakat dalam memberikan sedekah kepada para anak jalanan secara langsung, maka hal tersebut telah menghambat salah satu proses input dan output dalam proses pemberdayaan yang telah dijalankan. Proses pemberdayaan akan berjalan sia-sia, karena anak akan besar kemungkinan berpotensi kembali kejalan dimana anak akan menganggap bahwa jalananlah tempat terbaik bagi mereka untuk mencari nafkah.